

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Stakeholder didefinisikan oleh Donaldson (1995) sebagai individu atau kelompok dengan ketertarikan yang sah dalam hal prosedural dan/atau aspek substantif atas kegiatan perusahaan. Suwardjono (2008) juga mendefinisikan *stakeholder* sebagai semua partisipan yang menanggung segala aspek kegiatan bersama, partisipan ini terdiri atas pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Definisi tersebut diperkuat oleh pendapat dari Ghozali I. d., (2014) yang mengemukakan bahwa *stakeholder* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi serta mengendalikan pemakaian sumber-sumber ekonomi.

Teori *stakeholder* didefinisikan oleh Donaldson (1995) memiliki kegunaan untuk menerangkan serta memandu susunan dan pelaksanaan kegiatan dari perusahaan. Donaldson (1995) juga mengungkapkan berbagai fungsi dari teori *stakeholder*:

- a. Fungsi deskriptif dari teori *stakeholder* digunakan untuk menerangkan perilaku spesifik serta karakteristik perusahaan. Pembeneran secara deskriptif bertujuan untuk menunjukkan bahwa konsep yang diterapkan dalam teori telah sejalan dengan realitas yang diamati.
- b. Fungsi instrumental dari teori *stakeholder* bersamaan dengan data deskriptif / empiris yang tersedia akan dapat digunakan untuk

mengidentifikasi hubungan atau kurangnya hubungan antara manajemen stakeholder dan pencapaian tujuan dari perusahaan.

- c. Fungsi normatif dari teori ini digunakan untuk menjelaskan fungsi dari perusahaan, termasuk identifikasi dari pedoman yang digunakan untuk beroperasi dan mengelola perusahaan secara moral ataupun filosofis. Pembeneran secara normatif mendasari konsep seperti hak individual atau kelompok, kontrak sosial ataupun utilitarianisme.

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate governance (tata kelola perusahaan) diartikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* sebagai suatu sistem antara pemegang saham, dewan perusahaan, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem tersebut juga menyediakan struktur penetapan tujuan perusahaan, sarana pencapaian tujuan serta penentuan mengenai pemantauan kinerja. Dewan dari perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan tata kelolanya menggunakan sistem *two-tier boards*. OECD mendefinisikan sistem ini sebagai sistem yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi manajemen menjadi bagian yang berbeda.

Good Corporate Governance merupakan upaya dalam membangun perusahaan yang besar dan dapat berlangsung lama. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya perusahaan dalam pengendalian perusahaan yang lebih transparan bagi pemegang saham. Definisi *Good Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sementara Keputusan Menteri BUMN nomor keputusan 117/M-MBU/2002 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur atau proses yang dilakukan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan melindungi kepentingan-kepentingan para *stakeholders* berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* menurut FCGI menciptakan nilai tambah perusahaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan, karena pada dasarnya keuntungan penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan yaitu pengelolaan perusahaan menjadi lebih transparan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan tingkat Pengungkapan *Sustainability Report* juga semakin meningkat, dan dengan meningkatnya Pengungkapan *Sustainability Report* maka juga akan

bepengaruh pada minat investor untuk menanamkan sahamnya sehingga perusahaan akan mendapatkan tambahan modal untuk melangsungkan bisnisnya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), *Good Corporate Governance* memiliki asas-asas yang harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yakni:

1. Transparansi (*transparency*).

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*responsibility*).

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Melalui prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance tersebut diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. (Chandra, 2007 dalam Riantono, 2012).

4. Independensi (independency).

Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan (Mintara, 2008).

Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* memiliki peranan penting dalam perusahaan antara lain pemenuhan informasi penting yang berhubungan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham maupun para *stakeholder* dalam mengambil keputusan, perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh pihak direksi atau komisaris perusahaan, serta sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan dalam mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Dewan Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang menjalankan tugas melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS. Sebagai pemegang amanat dari pemegang saham, direksi harus bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan. Fungsi dewan direksi adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kepengurusan seperti menyusun visi dan misi perusahaan, mengendalikan sumber daya, memperhatikan kepentingan yang wajar pada pemangku kepentingan, dsb.
2. Berkaitan dengan manajemen risiko seperti melaksanakan manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan, melaksanakan pengambilan keputusan dengan hati-hati dan seksama, dsb.
3. Berkaitan dengan pengendalian internal seperti menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal.
4. Berkaitan dengan komunikasi seperti memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan.
5. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial seperti memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan, dan mempunyai perencanaan tertulis

yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Warsono, Amalia, Rahajeng, & Ridwan (2010) menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai penasehat yang memberikan saran, pendapat dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Tugas utama dari komisaris independen ini diantaranya menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan pengendalianm risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci; memantau dan mengatasi konflik kepentingan; dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.1.5 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan

audit, dan implementasi dari *Good Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

2.1.6 Pengungkapan Sustainability Report

Pengungkapan *Sustainability Report* merupakan suatu kegiatan untuk mengungkapkan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Pengungkapan sukarela didefinisikan oleh Suwardjono (2008) sebagai kegiatan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan di luar dari hal-hal yang diharuskan oleh peraturan badan pengawas atau standar akuntansi. *Sustainability Report* didefinisikan oleh GRI (2013) sebagai laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan mengenai dampak dari kegiatannya, khususnya terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Laporan ini juga berisikan mengenai tata kelola, nilai-nilai perusahaan, serta komitmen dan strategi perusahaan terkait dengan ekonomi keberlanjutan, termasuk pula kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan Pengungkapan *Sustainability Report* mencakup tiga kategori, yakni kategori lingkungan, kategori sosial dan kategori ekonomi. Kategori lingkungan terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan atas kegiatan yang dilakukannya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar

perusahaan seperti terkait penggunaan energi dan bahan baku. Selain itu juga terkait dengan pengelolaan limbah atau emisi yang dihasilkan perusahaan. Kategori sosial terkait tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja, serta masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan perusahaan hingga kegiatan filantropi atau sukarela yang diselenggarakan perusahaan. Kategori ekonomi terkait dengan kinerja ekonomi perusahaan yang terjadi pada masa kini dengan pengaruhnya di masa depan.

2.1.7 Kinerja Keuangan

Menurut Wibowo (2014) kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat - alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan yang dibuat oleh pihak - pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kinerja keuangan ini dipakai manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja keuangan tersebut dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang (Soelistyoningrum & Prastiwi, 2011).

Terdapat berbagai pengukuran yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, dan solvabilitas. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan dengan ROA (Return On Assets), karena didalam dunia usaha, perusahaan diharapkan untuk dapat menciptakan penghasilan yang

optimal. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang kuat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ambil terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian sekarang antara lain:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama (Tahun)	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan Di Bei, Umi Aniswatur Roudtul Jannah (2016).	X : Kinerja Keuangan Y : <i>Sustainability report</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara kinerja keuangan terhadap <i>Sustainability Report</i> .
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Modal, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015, Abdul Aziz (2017)	X : GCG, Struktur Modal, dan <i>Leverage</i> Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan board size, komisaris independent, komite audit, Struktur Modal dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
3	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur	X : GCG Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara

	<p>Industri Dasar Dan Kima Di Bei Periode 2013 – 2015, Era Ns, Rispantyo, Djoko K (2017).</p>		<p>dewan komisaris independen dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan.</p> <p>Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.</p>
4	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015), Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi.(2017)</p>	<p>X : GCG Y : Kinerja keuangan, Nilai Perusahaan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.</p>
5	<p>Peran <i>Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan <i>Voluntary Disclosure</i>, Fatmawati, Rini, Astuti, D. W., Dan Suhardjanto, D. (2018).</p>	<p>X : <i>Corporate Governance</i> Y : <i>Voluntary Disclosure</i></p>	<p><i>Corporate governance</i> diproksikan dengan kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris</p>

			<p>independen, dan komite audit.</p> <p>Pengukuran dari <i>voluntary disclosure</i> dengan menggunakan daftar item dari pojok terkait pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh positif dari komite audit dan kepemilikan publik, sedangkan dewan komisaris dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh.</p>
6	<p><i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan Dan <i>Sustainability Report</i> (Bumn Yang Listed Di Bei), Sri Wahjuni Latifah, M. Fahminuddin R, Lilik Purwanti, Tri Wahyu O.(2019)</p>	<p>X : GCG, Kinerja Keuangan</p> <p>Y : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara gcg yang diprosikan dengan dewan direksi, komite audit, dan ROA.</p> <p>Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara gcg yang diprosikan</p>

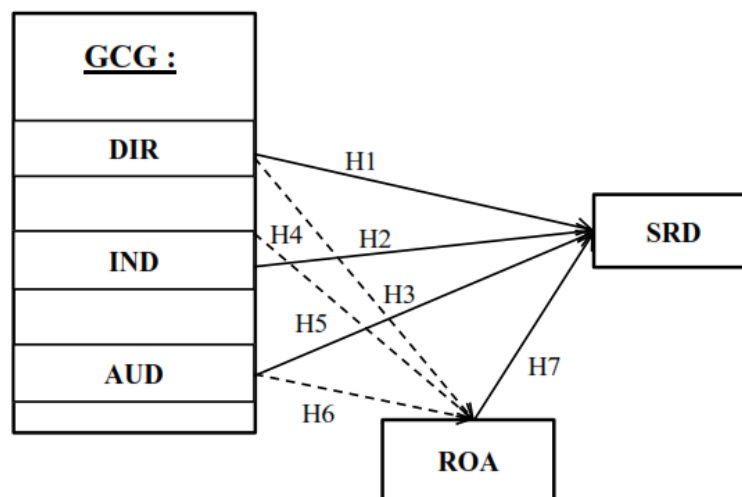
			dengan kepemilikan manajerial, dan komisaris independen.
7	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017) Faizah Naila Sofa dan Novita WeningTyas Respati (2020).	X : Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Y : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Dewan direksi dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan <i>sustainability report</i> . Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan <i>sustainability report</i> .

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* yang dimediasi dengan kinerja keuangan. penelitian ini menjadikan *sustainability report* sebagai variabel dependen dan di mediasi dengan kinerja keuangan membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tiga jenis variabel digunakan dalam penelitian ini. *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan dewan direksi (DIR), komisaris independen (IND), dan komite audit (AUD) merupakan variabel independen. Pengungkapan *Sustainability Report* (SRD) merupakan variabel dependen. Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA (Return On Assets) merupakan variabel mediasi. Hubungan antar variabel yang telah disebutkan sebelumnya dapat terlihat seperti dalam Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Good corporate governance merupakan suatu struktur atau proses yang dilakukan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*) berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi normatif

dari teori *stakeholder* yang diungkapkan oleh Donaldson (1995) menunjukkan bahwa dalam proses pencapaian tujuan perusahaan juga harus patuh terhadap peraturan serta norma yang berlaku. Peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan salah satunya adalah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut merujuk pada perusahaan yang dalam operasinya berkaitan dengan sumber daya alam harus mampu mempertanggungjawabkan kegiatannya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menerangkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan kegiatan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam laporan tahunan juga dengan mengungkapkan *sustainability report* sebagai perwujudan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, penerapan mekanisme *good corporate governance* sangat diperlukan dalam memastikan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal pengungkapan *sustainability report*.

2.4.1.1 Hubungan Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan (Latifah, Rosyid, Oktavendi, & Purwanti, 2019). Tanggungjawab utama dewan direksi adalah memastikan kelangsungan jangka panjang dari perusahaan untuk melakukan pengawasan dari manajemen. Dewan direksi juga mempunyai tanggungjawab

dalam memastikan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk laporan yang bersifat sukarela yaitu menerbitkan *sustainability report* (Sutedi, 2012). Semakin banyaknya anggota dewan direksi semakin efektif pengawasan terkait perusahaan juga harus melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofa & Respati (2020) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

2.4.1.2 Hubungan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen harus mampu mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yang sesuai norma dengan melaksanakan fungsi pengawasannya dan fungsi normatif dari teori *stakeholder*. Variabel ini diukur dengan ratio antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan anggota dewan komisaris. Proporsi dari komisaris independen yang dimiliki perusahaan dinilai berpengaruh pada

Pengungkapan *Sustainability Report*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak anggota komisaris independen atau anggota komisaris dari luar perusahaan bermakna bahwa perusahaan mampu menerima pendapat serta pengawasan terkait kegiatan yang dilaksanakannya secara objektif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang oleh Fatmawati, Astuti, & Suhardjanto (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif dari komisaris independen. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

2.4.1.3 Hubungan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Latifah, Rosyid, Oktavendi, & Purwanti, (2019) komite audit merupakan sebuah komite yang membantu tugas pengawasan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya pengawasan dalam hal pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Berdasarkan *international best practies* komite audit mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. Dalam bidang *corporate governance* komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi segala peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral (Sutedi, 2012). Dengan ini banyaknya anggota komite audit sangat berpengaruh dalam tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan termasuk pengungkapan *sustainability report*. Karena komite audit menjadi

penghubung antara dewan direksi dan dewan komisaris independen.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatmawati, Astuti, & Suhardjanto, 2018 dan Latifah, Rosyid, Oktavendi, & Purwanti, 2019) menunjukkan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

2.4.2 Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholder* yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu. Fungsi instrumental dari teori *stakeholder* yang dijelaskan oleh Donaldson, (1995) dapat melandasi pemangku kepentingan perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencapaian perusahaan pada umumnya seperti pertumbuhan, keuntungan, dan lain sebagainya. Pemangku kepentingan perusahaan yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan agar tercapainya tujuan perusahaan secara langsung yakni dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit.

2.4.2.1 Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (5) menerangkan bahwa organ yang bertanggung jawab serta memiliki wewenang penuh terkait pengurusan dan kepentingan perusahaan adalah dewan direksi. Dewan direksi bertanggungjawab mengendalikan perusahaan dalam

meningkatkan kesehatan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Dewan direksi merupakan faktor penentu dalam terbentuknya kebijakan yang diambil perusahaan, selain itu dewan direksi juga bertanggungjawab dalam menentukan strategi yang akan diambil perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan ikut meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kristianto, Rispantyo, & Sari, (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.2.2 Hubungan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pemangku kepentingan dalam perusahaan (KNKG, 2006). Anggota tersebut memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan melakukan pengawasan terkait kegiatan perusahaan. Pelaksanaan tugas dan fungsinya akan mempertimbangkan dampak setiap keputusan bagi pemegang saham minoritas. Semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen yang

berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam akan memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Sehingga komisaris independen akan mampu mendorong kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu oleh Kristianto, Rispantyo, & Sari, (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.2.3 Hubungan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (Agustiningsih, 2017). Dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya, membentuk sebuah komite audit dibawahnya untuk mengawasi agar struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Komite ini bertugas untuk melakukan kegiatan inspeksi terkait kegiatan perusahaan dan melakukan tinjauan atas laporan keuangan. Kegiatan tersebut akan menunjukkan baiknya struktur pengendalian internal. Informasi penting yang diungkapkan pada laporan keuangan tersebut juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa semakin tinggi komite audit maka semakin besar atau semakin tinggi pula tingkat kualitas pelaporan dan monitoring terhadap manajemen, karena semakin efektif pengawasan komite audit akan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Hal ini didasari oleh penelitian Sarafina & Saifi, (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif dari

komite audit terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.3 Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Wibowo (2014) kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang diukur dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ratio ROA (Return on Assets). Ratio ini digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang kuat. Sehingga perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat serta dapat melakukan pengungkapan *sustainability report* yang lebih komprehensif. Berdasarkan hal ini, semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan *sustainability report*. Penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan *sustainability report* oleh Jannah, (2016) menunjukkan pengaruh positif dari kinerja keuangan terhadap *sustainability report*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H7: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

2.4.4 Good Corporate Governance dan Pengungkapan Sustainability Report dengan Mediasi Kinerja Keuangan

Fungsi instrumental dari teori *stakeholder* melandasi organ-organ perusahaan dalam bertindak agar tercapainya tujuan bersama, salah satunya adalah dengan tercapainya kinerja keuangan yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan lainnya. Fungsi normatif dari teori *stakeholder* lalu melandasi alasan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report* setelah mampu mencapai tujuan. Perusahaan yang mampu melaksanakan *good corporate governance* tentunya akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula dan akan mendorong untuk lebih gencar dalam melakukan kegiatan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungannya dan tentunya akan terdorong untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa semakin tinggi *good corporate governance* dapat mendukung kinerja keuangan yang baik sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Kristianto, Rispantyo, & Sari, (2017) yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam melakukan pengawasan kegiatan dan melakukan tinjauan atas laporan keuangan perusahaan, maka semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Disamping itu, kinerja keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin tinggi kinerja keuangan yang

dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan *sustainability report* (Jannah, 2016). berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H8: Kinerja keuangan mampu memediasi hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

